

SUKU LAUT DI KEPULAUAN RIAU: MEWUJUDKAN MASYARAKAT TERDIDIK DAN SEHAT

Petra Wahyu Utama, M.Hum
Universitas Khairun
email: petrawahyu.utama@unkhair.ac.id

Abstrak

Maritim merupakan jembatan budaya yang berperan sebagai pembina sebuah peradaban. Hubungan antar suku bangsa di wilayah Kepulauan Riau yang telah terjalin sejak lama menghantarkan mereka kepada Tamadun Alam Melayu yang unik yang berciri khas kabaharian. Menurut Tenas Effendy (2006), ketamadunan masyarakat Melayu dituangkan lewat buku Tunjuk Ajar Melayu yang digunakan sebagai pedoman mereka dalam mendidik anak-anaknya, didalamnya terdapat bagian yang berbunyi, "Anakku duduk memangku negeri, baik-baik memelihara diri, jangan diubah adat yang bahari, supaya ramai dagang santri". Ini membuktikan bahwa laut menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya mempertahankan eksistensi kebudayaan Melayu itu sendiri. Suku Laut merupakan sebutan untuk menunjukkan orang yang pada hakikatnya hidup, bertempat tinggal dan memiliki habitasi di laut. Suku Laut memiliki beberapa nama lain seperti Suku Pengembara dan Orang Sampan yang hidup berkelompok-kelompok dan membentuk beberapa klan.

Abstract

Maritime is a cultural bridge that acts as a builder of a civilization. The relationship between ethnic groups in the Riau Islands region that has been established for a long time has led them to "Tamadun Alam Melayu" a unique maritime characteristics. According to Tenas Effendy (2006), the civilization of the Malay community is expressed through the book Tunjuk Ajar Melayu which is used as their guide in educating their children, in which there is a section that reads, "My son sits on the back of the land, well take care of himself, do not change the customs of the sea, so that there is a lot of trade of students". This proves that the sea is a very important part in the effort to maintain the existence of Malay culture itself. Sea tribe is a term to indicate people who essentially live, live and have habitations in the sea. The Sea Tribe has several other names such as the Wandering Tribe and the Canoe People who live in groups and form several clans.

Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara Maritim memiliki komunitas suku yang melakukan seluruh aktivitas kegiatan hidup di laut dan menggunakan perahu atau sampan, yang beratapkan sebuah kajang sebagai rumah. Mereka sering disebut Suku Laut atau Orang Laut merupakan suku bangsa yang bertempat tinggal di perahu dan hidup mengembara hidup berpindah dari pulau ke pulau hingga muara sungai (Lapian, 2009).

Di Wilayah Kepulauan Riau, Suku Laut mulai menghuni wilayah Melayu-Lingga, pada tahun 2500-1500 SM sebagai bangsa Melayu Tua (Proto Melayu). Menyebar ke

sebagian besar wilayah Sumatera melalui Semenanjung Malaka. Mereka kemudian dikenal sebagai perompak, tetapi berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor. Seiring perkembangannya mereka dipakai oleh kesultanan untuk menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, hingga memandu para pedagang ke pelabuhan kerajaan (Inge, <https://www.melayupedia.com/berita/501/>).

Orang Laut dalam sejarah melayu kemudian dikenal sebagai penjaga wilayah perairan kesultanan, pasukan perang, dan bertugas untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan laut bagi pihak kesultanan. Namun seiring berjalannya waktu, setelah kemerdekaan Indonesia, mereka dimasukkan ke dalam kategori 'masyarakat terasing' karena dipandang jauh dari aksesibilitas pendidikan, pekerjaan, kualitas kesehatan, dan hunian yang jauh berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia. Pengategorian ini menjadi pemicu munculnya kebijakan untuk "mendaratkan" mereka supaya mendapatkan fasilitas yang sama dengan masyarakat lainnya.

Nyatanya, tidak semua solusi dari pemerintah untuk memindahkan habitasi mereka berhasil. Ironisnya, Suku Laut seperti dicabut secara paksa dari akar budayanya. Banyak dari mereka yang pada akhirnya kembali lagi ke laut dan meninggalkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Nilai-nilai lama dari kehidupan Suku Laut yang dipertanyakan, sejatinya belum terjawab dengan konsep nilai-nilai baru yang ditawarkan oleh pemerintah. Sehingga diperlukan penyusunan kebijakan yang disesuaikan dengan akar kebudayaan yang dimiliki oleh Suku Laut itu sendiri.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi Pustaka Studi yang merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983: 420). Penelusuran sumber lainnya adalah dengan cara browsing di internet untuk mendapat data dan sumber yang berasal dari dunia maya. Melalui kedua cara itu, penulis memperoleh beberapa data dan keterangan yang sesuai dengan topik pembahasan dengan cara seperti itu, penulis dapat mengetahui beberapa konsep dan teori yang sesuai dengan topik yang sedang dikerjakan.

Setelah data dan fakta berhasil diperoleh maka kemudian diolah dengan bantuan pendekatan yang dipakai dalam penulisan artikel ini, yaitu pendekatan kesejarahan

dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial lain sebagai pisau analisisnya. Dengan cara itu, dapat dirumuskan permasalahan yang muncul terkait dengan pendidikan dan kesehatan Suku Laut di Kepulauan Riau. Selanjutnya, data dan fakta disatukan untuk ditulis menjadi tulisan yang sistematis dan mudah dipahami.

Eksistensi dan Klasifikasi Suku Laut

Menurut Cynthia Chou (2009), dalam sejarah Melayu Orang Laut dikenal sebagai penjaga wilayah perairan kesultanan, pasukan perang, dan bertugas untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan laut bagi pihak kesultanan. Suku Laut merupakan suku yang hidup didalam perahu yang senantiasa hidup mengembara dilautan. Pada abad ke-18, Orang Laut telah benar-benar tunduk dibawah kesultanan Riau-Lingga, mereka merupakan sekumpulan kelompok suku bangsa atau klan yang dibedakan berdasarkan teritori domisili mereka dan sangat setia terhadap para Zuriat Melayu. Ketika klan Orang Laut itu bersatu, mereka disebut sebagai “Orang Kerahan”, mereka selalu berpandangan bahwa orang Melayu adalah kaum aristokrat dan pedagang yang harus dihormati. Orang Laut bersama dengan orang Bugis dan Banjar adalah suku yang pada masa lalu selalu terlibat dalam mempertahankan kerajaan.

Wilayah perairan Kepulauan Riau merupakan kawasan yang didiami oleh beberapa klan dari Orang Laut, masing-masing klan Orang Laut ini dipimpin oleh seorang Batin (Kepala Suku). Suku Tambus, Suku Galang, Suku Mantang, Suku Barok, dan Suku Mapor adalah suku dari Orang Laut yang mendiami kawasan perairan ini. Dalam satu kelompok suku laut atau klan bisa mencapai sekitar 30-an kajang/sampan. Satu kajang/sampan biasanya dihuni oleh satu keluarga (Lenhart, 1997: 584-585). Orang Laut yang berada dikawasan perairan Kepulauan Riau memiliki klasifikasi yang berbeda dengan Suku Laut lain di Asia Tenggara seperti Orak Lawoi, Bajau, Moken, dan Ameng Sawang (Evawarni, 2005). Oleh sebab itu para ahli kemudian melakukan pengklasifikasian terhadap mereka yakni:

1. Urak Lawoi’/Orak Lawoi’/Lawta/Chaw Talay/Chawnam/Lawoi yang memiliki habitasi di perairan Pulau Phuket, Phi Phi, Jum, Lanta, Bulon, Lipe, Andang di Kepulauan Andang, dan Andaman Thailand Selatan dimana sebagian mereka menganut Traditional Religion (Animisme), Theravada Buddhis, dan Kristiani serta berbahasa Melayu Cho Lai/Melayu Urak Lawoi.

2. Suku Moken yang memiliki habitasi di perairan Thailand Selatan, Myanmar (Birma), dan Malaysia (Laut Andaman) dimana mereka berbahasa Moken.
3. Suku Laut/Orang Laut/ Orang Sampan Subgrup: Orang (Suku) Mantang, Orang (Suku) Mapor, Orang (Suku) Barok, dan Orang (Suku) Galang yang memiliki habitasi di perairan Provinsi Kepulauan Riau Indonesia yang sebagian dari mereka masih memuja Dewa Laut dan sebagian lainnya telah memeluk Islam dengan dialek Melayu yang khas Orang Laut.
4. Suku Ameng Sewang yang memiliki habitasi di perairan Provinsi Bangka Belitung, Indonesia yang mana 90% dari mereka telah memeluk agama Islam dan berbahasa Melayu Bangka
5. Badjao/Badjau, Bajao, Bajaw yang memiliki habitasi di perairan Pulau Kalimantan bagian timur, Sulawesi Utara (Indonesia), Malaysia, dan Filipina. Sebagian dari mereka masih percaya akan keyakinan lokal dan sebagian lagi telah menganut agama Kristiani. Bahasa Malayu Polinesia digunakan secara khas oleh mereka sesuai dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing.



Gambar 1. Sampan Suku Laut di Kepulauan Riau
Sumber: Buku Orang Laut dan Potret Kerukunan Beragama di Kepulauan Riau

Kebanyakan Orang Laut di Kepulauan Riau masih hidup dilaut dan memfungsikan sampan sebagai rumah mereka dan banyak menghabiskan waktunya di lautan. Pola hidup mereka masih berpindah-pindah tempat antara pulau yang satu ke pulau yang lainnya

(nomaden) karena dalam mempertahankan hidupnya, orang-orang laut ini masih benar-benar mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Orang Laut ini hidup berkelompok-kelompok sehingga membentuk beberapa klan. Klan tersebut dibedakan berdasarkan teritorial domisili mereka. Dalam satu kelompok suku laut atau klan bisa mencapai sekitar 30-an kajang/sampan. Satu kajang/sampan biasanya dihuni oleh satu keluarga yang anak-anaknya masih kecil, dibawah 10 tahun. Barulah jika anak, terutama laki-laki, telah beranjak remaja akan dibuatkan kajang sendiri. Di atas kajang ini pula, mereka mencari pasangan hidup dan membentuk keluarga baru. Kelompok Orang Suku Laut akan mendarat di suatu pulau jika mereka hendak mengambil air bersih, mengebumikan anggota kelompoknya yang meninggal dunia, dan menjual ikan hasil tangkapannya. Tidak ada pulau yang tetap yang mereka singgahi, dimana mereka memerlukan kebutuhan hidup, disana mereka akan berlabuh atau singgah.

Kebijakan “Mendaratkan”

Maritim sudah menjadi budaya yang mengakar kuat di tengah masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Dari mulai perihal mencari nafkah hingga adat istiadat yang dipelihara hingga saat ini, sebagian besar adalah perwujudan dari kebudayaan maritim. Berkaitan dengan Orang Laut ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai membenahi tatanan pola kehidupan mereka dengan membangun sarana perumahan, kesehatan, dan pendidikan disekitar pesisir pantai yang khusus diberikan secara gratis dan berabagai program-program pemberdayaan masyarakat pulau dan pesisir, yang khusus ditujukan untuk Orang Laut.

Bertahun-tahun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya sosialisasi kepada Orang Laut dan membujuk mereka untuk tinggal di darat. Pada awalnya Orang Laut menuruti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Namun hal ini tidak berlangsung lama, banyak dari mereka yang meninggalkan rumah-rumah yang telah disediakan dan kembali lagi hidup di laut karena mereka menganggap rumah di darat hanya sebagai persinggahan sementara saja. Hal ini tidak serta merta membuat pemerintah setempat menjadi patah semangat. Upaya terus dilakukan pemerintah agar Orang Laut ini mau tinggal dan menetap di darat. Harapan pemerintah adalah ketika mereka mampu hidup di darat maka upaya untuk mendekatkan mereka terhadap peradaban modern akan semakin besar. Orang laut kemudian sedikit demi sedikit telah menempati rumah-rumah yang disediakan oleh pemerintah dikawasan Berakit (Kecamatan Teluk Sebong), Air Kelubi

(Kecamatan Bintang Pesisir), Numbing (Bintang Pesisir), Kawal Pantai (Gunung Kijang) dan Mapur (Teluk Sebong), Pulau Bertam (Batam), Desa Penuba (Lingga), Pulau Mensemut (Senayang), dan beberapa titik di Anambas serta Natuna (Arman, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/orang-laut-bintan/>).



Gambar 2. Perkampungan Orang Suku Laut di Desa Berakit, Bintang 2017 Sumber: BPNB Kepulauan Riau

Akan tetapi frame pemerintah bahwa segala sesuatu yang beradab harus berhubungan dengan darat seolah-olah melupakan bahwa orang-orang laut ini adalah kelompok yang sejak ratusan tahun lalu telah mengarungi lautan pada siang hari maupun malam hari, hujan, badai bahkan gelombang besar bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi mereka tetapi merupakan tantangan yang harus disikapinya dengan arif dan bijak. Kepekaan mereka terhadap tanda-tanda yang diberikan oleh alam jauh melebihi orang-orang yang lahir dan menghabiskan hidupnya didarat. Jadi tidak heran jika mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan alam.

"Mendaratkan" yang selama ini masih dianggap sebagai upaya satu-satunya upaya untuk mendekatkan mereka kepada peradaban modern, pemerataan kesejahteraan dan pendidikan harus dikaji ulang. Mengingat sejak ratusan tahun lalu mereka telah memiliki peradabannya sendiri bahkan jauh lebih hebat dalam mengamati fenomena alam dibanding dengan teknologi modern yang dipakai pada saat ini. Solusi baru yang lebih baik harus segera diformulasikan agar mereka yang sudah didaratkan tidak melulu

kembali lagi ke laut sehingga pemerataan kesejahteraan bagi Orang Laut ini dapat tercapai dengan baik.

Meniscayakan Puskesmas Terapung dan Sekolah Perahu

Pendidikan dan kesehatan penting karena keduanya merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan landasan dasar dalam membentuk kemampuan individu. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas sering kali tidak merata. Begitupun dengan kesehatan, padahal masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih besar dalam berbagai sektor kehidupan. Kenyataan itu juga berlaku pada masyarakat Suku Laut. Mereka sangat sulit mengakses pendidikan, mengingat kehidupan mereka banyak dihabiskan di lautan dibanding di daratan.

Dewasa ini, satu-satunya sekolah yang dapat diakses oleh anak-anak suku laut Pulau Gara terletak di Pulau Bertam. Dan bila ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) anak-anak suku laut Pulau Gara juga harus menyebrang lautan dengan menempuh jarak yang cukup jauh hingga memakan waktu lebih kurang 30 menit ke Pulau Kasu (Simanjuntak, <https://batam.tribunnews.com/2022/01/18/>). Pengadaan Puskesmas Terapung juga berusaha dilakukan, namun pihak Dinas Kesehatan memandang bahwa biaya operasional untuk melaksanakannya terlalu tinggi. Belum lagi faktor non teknis seperti cuaca yang menghambat puskesmas terapung untuk beroperasi (Panama, <https://kepri.antaranews.com/berita/49296/>).

Namun demikian, sejatinya sarana ini harus tetap terwujud. Mengingat pendidikan dan kesehatan merupakan hak dari seluruh masyarakat. pemerintah harus melakukan rekrutmen terhadap tenaga medis ataupun tenaga pendidik yang benar-benar memiliki hati untuk mencerdaskan dan menyehatkan kehidupan mereka. Jika perlu tenaga-tenaga pendidik dan kesehatan ini diberikan bayaran besar sesuai dengan jerih payah yang mereka lakukan. Berikut dengan infrastruktur penunjangnya. Hingga sekarang masih belum ada sekolah-sekolah formal yg dibuat khusus dengan menggunakan perahu sebagai sarana dan tempat anak-anak dari Orang Laut untuk belajar dalam menimba ilmu pengetahuan. Puskesmas terapung sudah berjalan, namun belum optimal. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kesimpulan

Perlu disadari bahwa nilai-nilai budaya dari Orang Laut adalah sebuah kekhasan yang membedakan jati diri mereka dengan masyarakat yang lainnya. Upaya "Mendaratkan" justru menyebabkan laut menjadi tersingkir dari ranah budayanya dimana selama ini laut adalah sumber kehidupan bagi mereka. Hal ini secara otomatis juga menimbulkan keterpaksaan bagi mereka untuk 'menetap' di satu-dua tempat, dan tidak lagi bisa hidup berpindah seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya.

Jika pemerintah mampu mewujudkan solusi yang lebih baik, maka dengan demikian kita sebagai orang Indonesia yang sering menyanyikan lagu "Nenek Moyangku Seorang Pelaut" tidak melupakan identitas bangsanya sendiri sebagai masyarakat maritim, mengingat nenek moyang kita yang sejak berabad-abad lalu telah menjadikan laut sebagai dimensi utama dalam dinamika perdagangan dan sarana interaksi antar bangsa maka "Melautkan Diri Kita Kepada Orang Laut" adalah hal yang harus segera mewujud.

Referensi

- Chou, Cynthia. 2009. *The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: The Inalienable Gift of Territory*. London: Routledge.
- Dedi Arman. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/orang-laut-bintan/>.
- Effendy Tenas. 2006. *Tunjuk Ajar Melayu*. Tanjungpinang: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Evawarni. 2005, *Kearifan Lokal Adat Orang Laut di Kepulauan Riau*. Dokumentasi dan Perpustakaan Balai Kajian Sejarah Tanjung Pinang.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lapian. A.B. 2009, *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Lenhart, Lioba. 1997, *Orang Suku Laut Ethnicity and Acculturation: Riau in Transition*. Published by KITLV: Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies.
- Nefri Inge. <https://www.melayupedia.com/berita/501/>.
- Nikolas Panama, <https://kepri.antaranews.com/berita/49296/program-puskesmas-terapung-di-kepri-tidak-efektif>.
- Simanjuntak. <https://batam.tribunnews.com/2022/01/18/>.